



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MISBAHUL MUNIR
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 83228

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 565.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m²/36 m² di KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 56 m² di KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/36 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 264.500.000

1. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO KENDARAAN RODA 2 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO KENDARAAN RODA 2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO KENDARAAN RODA 2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO KENDARAAN RODA 2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
6. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 63.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	78.922.993
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	971.422.993
III. HUTANG	Rp.	213.937.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	757.485.993

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.